2027

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II. HASIL EVALUASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU 9

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja berupa IKU Tahun 2025 9

2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025....., 13

2.3 Rumusan Masalah dan Isu Strategis Tahun 2027 dan Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025..... 13

2.4 Telaah Pokok Pokok Pikiran DPRD..... 19

2.5 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat..... 19

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK..... 20

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 20

3.2 Arah Kebijakan yang Selaras dengan renstra 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027 dan Kebijakan Nasional..... 22

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 24

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 67

5.1 Indikator Kinerja Utama..... 67

5.2 Indikator Kinerja Kunci..... 68

BAB VI PENUTUP..... 69

LAMPIRAN..... 70

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dalam hal ini Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja Bakesbangpol) Kota Pasuruan, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Renja menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan terukur.

Renja Bakesbangpol disusun sebagai implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja tahunan. Selain itu, penyusunan Renja juga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dengan memperhatikan sinkronisasi dan keterpaduan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Tahun 2025–2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2025–2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan.

Penyusunan Renja Bakesbangpol diawali dengan penyusunan rancangan Renja yang mengacu pada rancangan awal RKPD. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara sistematis melalui pengkajian terhadap kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta evaluasi pencapaian target kinerja Renstra sebagai dasar dalam merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan adanya kesinambungan perencanaan, peningkatan kualitas kinerja, serta keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dokumen Renja Bakesbangpol Tahun 2027 merupakan

dokumen perencanaan tahunan pada tahun ketiga pelaksanaan Renstra Bakesbangpol Tahun 2025–2029. Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja, target kinerja, program, kegiatan, subkegiatan, serta kebutuhan pendanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik selama Tahun Anggaran 2027.

Penyusunan Renja Tahun 2027 juga mempertimbangkan berbagai isu strategis, permasalahan, tantangan, serta dinamika perkembangan lingkungan strategis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang direncanakan diarahkan untuk mendukung terwujudnya kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tertib, harmonis, demokratis, serta memiliki ketahanan sosial yang kuat melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan dalam bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama, politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional, serta penanganan konflik sosial.

1.2 Landasan Hukum

Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5059);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 06);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 127);
25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 2);
27. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
28. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2027 adalah untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik melalui koordinasi, fasilitasi, mediasi, serta pembinaan di wilayah Kota Pasuruan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2027 adalah sebagai: 1) acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2027 2) edoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan agar selaras dengan sasaran dan target kinerja perangkat daerah 3) Instrumen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025–2029 4) Alat pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Gambaran umum penyusunan

rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Bakesbangpol, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Bakesbangpol dengan dokumen RKPD dan Renstra Bakesbangpol, dan tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum
Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Renja Bakesbangpol.

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bakesbangpol.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bakesbangpol serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah)

2.2 Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait)

2.3 Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan kondisi lingkungan dinamis

2.4 Telaah Pokok-pokok pikiran DPRD

2.5 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Telaahan Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).

3.2 Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan

RPJMD Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB VI : PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2027

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang berlaku pada saat itu. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja guna mendukung pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah. Seiring dengan perubahan nomenklatur bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan yang mulai berlaku pada Tahun 2026, penyusunan Renja Tahun 2027 telah menyesuaikan nomenklatur organisasi tanpa mengubah substansi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan keselarasan antara struktur organisasi, pembagian tugas dan fungsi, serta pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 memiliki 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis. Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun yaitu Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Toleransi dan Rukun. Pelaksanaan urusan Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Toleran dan Rukun diukur melalui indikator Indeks Keharmonisan Sosial. Pada tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 59,83, dan terealisasi sebesar 59,13, sehingga capaian kinerjanya mencapai 98,83%. Capaian Indeks Keharmonisan Sosial tersebut diperoleh dari nilai rata-rata tiga indeks pembentuk, yaitu Indeks Toleransi, Indeks Keterlibatan Komunitas, dan Indeks Konflik

Sosial, yang masing-masing mengukur aspek keharmonisan sosial sesuai dengan ruang lingkupnya. Belum tercapainya target indikator Indeks Keharmonisan Sosial disebabkan oleh belum tercapainya target pada salah satu indeks pembentuk, yaitu Indeks Toleransi. Namun demikian, berdasarkan nilai capaian yang diperoleh, Kota Pasuruan secara umum telah menunjukkan kondisi keharmonisan sosial yang baik.

2. Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

   a. Indeks Toleransi pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 89,50, dan terealisasi sebesar 86,81, sehingga capaian kinerjanya mencapai 96,99%. Indeks Toleransi dihitung berdasarkan penggabungan dua dimensi utama, yaitu dimensi relasi antar manusia serta dimensi etika dan budi pekerti. Dimensi relasi antar manusia menggambarkan kemampuan masyarakat dalam menjalin hubungan yang harmonis, menghargai perbedaan, serta bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, dimensi etika dan budi pekerti mencerminkan penerapan nilai-nilai moral, sikap saling menghormati, serta integritas dalam kehidupan sehari-hari. Belum tercapainya target pada Indeks Toleransi mengindikasikan adanya kecenderungan pelemahan penerimaan terhadap perbedaan di tengah masyarakat, yang perlu menjadi perhatian serius pada periode berikutnya. Meskipun capaian indikator ini relatif mendekati target, Indeks Toleransi belum dapat dikategorikan berhasil dan masih memerlukan upaya penguatan yang lebih terarah dan berkelanjutan pada tahun selanjutnya.

   b. Indeks Keterlibatan Komunitas pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 45 dan terealisasi sebesar 50, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan perbandingan total skor keterlibatan komunitas terhadap jumlah kegiatan keterlibatan komunitas yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun. Pada tahun 2025, jumlah kegiatan keterlibatan komunitas yang dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan dengan total skor sebesar 10. Nilai indeks diperoleh dari hasil pembagian total skor keterlibatan komunitas dengan jumlah kegiatan, selanjutnya dibandingkan dengan skor maksimum penilaian dan dikonversi ke dalam bentuk indeks. Dengan demikian, nilai Indeks Keterlibatan Komunitas sebesar 50,

yang berada pada kategori sedang. Ketercapaian indikator ini didukung oleh meningkatnya partisipasi dan keterlibatan komunitas dalam berbagai kegiatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, yang realisasinya lebih baik dari yang telah direncanakan.

c. Indeks Konflik Sosial pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 45 dan terealisasi sebesar 40,59. Indikator ini merupakan indikator dengan tren negatif, di mana semakin rendah nilai indeks menunjukkan kondisi yang semakin baik. Capaian Indeks Konflik Sosial diperoleh berdasarkan perbandingan total skor jenis konflik terhadap jumlah jenis konflik yang terjadi di 4 kecamatan selama kurun waktu satu tahun. Pada tahun 2025, total skor jenis konflik yang tercatat sebesar 136. Nilai indeks dihitung dengan membagi total skor jenis konflik dengan jumlah jenis konflik, kemudian dibandingkan dengan skor maksimum penilaian dan dikonversi ke dalam bentuk indeks. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nilai Indeks Konflik Sosial tercatat sebesar 40,59 dan berada pada kategori waspada sedang, yang menunjukkan bahwa kondisi konflik sosial masih memerlukan perhatian serta pengendalian lebih lanjut. Ketercapaian indikator ini didukung oleh terlaksananya PUSKOMIN (Pusat Komunikasi dan Informasi) yang berperan sebagai wadah koordinasi lintas sektor dengan jajaran samping, antara lain tim intelijen dari Kodim 0819, Polres Pasuruan Kota, dan Yonzipur 10 Pasuruan dalam rangka mendeteksi, membahas, dan menangani potensi konflik yang muncul. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian dan penanganan konflik sosial telah berjalan dengan baik.

Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator strategis yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Pada Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK), sehingga tidak terdapat capaian IKK yang dapat disajikan dalam laporan ini.

Adapun realisasi capaian IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKK Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Kinerja

No	Indikator IKU	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Catatan Analisa
	IKU				
1	Indeks Keharmonisan Sosial	Indeks	59,83	59,13	Belum mencapai target. Realisasi sebesar 59,13 dari target 59,83. Perlu penguatan kegiatan yang mendukung keharmonisan sosial terutama rasa toleransi terhadap sesama.
2	Indeks Toleransi	Indeks	89,5	86,81	Belum mencapai target. Realisasi sebesar 86,81 dari target 89,50. Perlu optimalisasi edukasi nilai-nilai tolernasi serta kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat
3	Indeks Keterlibatan Komunitas	Indeks	45	50	Target tercapai bahkan melampaui target. Realisasi sebesar 50 dari target 45. Hal ini menunjukkan meningkatnya partisipasi komunitas dalam kegiatan sosial dan pembangunan daerah
4	Indeks Konflik Sosial	Indeks	45	40,59	Target tercapai. Realisasi sebesar 40,59 lebih baik dari target 45 (semakin rendah nilai indeks menunjukkan kondisi yang lebih kondusif). Upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial berjalan efektif.
	IKK				
	N I H I I L	-	-	-	-

2.2 Evaluasi Capaian SPM

Tabel 2.2 Evaluasi Capaian SPM

No	Indikator SPM	Satuan	Target			Realisasi			Catatan Analisa
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	
	N I H I L	-	-	-	-	-	-	-	-

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara sebagai standar pelayanan minimal. Pada periode Tahun 2023–2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi objek Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan demikian, tidak terdapat target maupun capaian kinerja SPM yang menjadi dasar pengukuran kinerja Bakesbangpol pada periode tersebut.

2.3 Isu – Isu Rumusan Masalah Dan Isu Strategis Tahun 2027 dan Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025

Rumusan Masalah dan Isu Strategis Tahun 2027

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik;
d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tetapi dalam pelaksanaannya, Badan Kesatuan bangsa dan Politik masih menghadapi permasalahan pembangunan daerah pada

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Pasuruan antara lain sebagai berikut:

a. Masih terdapat tantangan dalam meningkatkan ketahanan ideologi masyarakat terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, dan paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila di ruang digital.
b. Belum optimalnya keterlibatan generasi muda dan masyarakat dalam kegiatan pendidikan politik, wawasan kebangsaan, serta upaya pencegahan potensi konflik sosial melalui pendekatan yang inovatif dan berbasis digital.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, evaluasi pencapaian target Renstra, serta memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah, diperoleh beberapa isu strategis pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi prioritas penanganan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, yaitu sebagai berikut:

a. Penguatan ketahanan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan bela negara melalui pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan karakteristik generasi muda.
b. Peningkatan kualitas deteksi dini, pencegahan, dan penanganan potensi konflik sosial guna menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas daerah melalui sinergi antar pemangku kepentingan.
c. Penguatan literasi digital masyarakat dalam menghadapi penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, intoleransi, dan paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
d. Peningkatan kualitas pendidikan politik dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi, khususnya bagi generasi muda, perempuan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kepemudaan.

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam menilai kinerja perangkat daerah,

mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan sebagai bahan penyusunan Renja Tahun berikutnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab organisasi melalui 6 (enam) program dengan 13 (Tiga belas) kegiatan, dan 34 (Tiga puluh empat) sub kegiatan. Adapun realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi, telah memenuhi dan melebihi target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
    - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tidak memenuhi target dikarenakan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan
    - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tidak memenuhi target dikarenakan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa terealisasikan
    - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik tidak memenuhi target dikarenakan adanya penyesuaian kebijakan dan prioritas anggaran, di mana alokasi anggaran untuk kegiatan pendidikan pemilih pemula dialihkan untuk mendukung kegiatan lain yang lebih prioritas
b. Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja
    - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah
    - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

    Secara umum, Kegiatan tersebut merupakan yang dilakukan rutin setiap tahun. Target kinerja dapat tercapai sebesar 100% karena

seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, kebutuhan organisasi, dan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan, serta didukung oleh koordinasi dan pengelolaan administrasi yang baik.

c. Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja
    - Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan diukur melalui indikator Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target sebesar 10% terealisasi sebesar 10,17% didukung oleh satu kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target sebesar 3% dan terealisasi sebesar 3,13%. Keduanya memiliki capaian melebihi target disebabkan karena tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan pembinaan wawasan terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
    - Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik diukur dengan indikator yaitu Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan pendidikan politik ditargetkan sebesar 20% dan terealisasi 39,13%. Ketercapaian target indikator didukung oleh adanya koordinasi dan sinergi yang efektif antara perangkat daerah, partai politik, dan lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Serta tingkat partisipasi peserta yang tinggi, khususnya dari partai politik penerima bantuan keuangan, yang mendukung peningkatan pemahaman terhadap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
    - Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan diukur melalui indikator Persentase Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat (Ormas/LSM) yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan target sebesar 3% dan terealisasi sebesar 3,01% didukung satu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan indikator

Persentase Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dengan target sebesar 40% dan terealisasi sebesar 43,73%. Keduanya memiliki capaian melebihi target karena didukung oleh pelaksanaan pelayanan pendaftaran SKT yang berjalan secara efektif dan responsif, sehingga mendorong peningkatan jumlah organisasi kemasyarakatan yang terlayani serta terdata secara lebih tertib dan akurat.

- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya diukur melalui indikator Persentase Lembaga Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Aktif dengan target sebesar 20% dan terealisasi sebesar 63,30% didukung satu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dengan indikator Persentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif target sebesar 85% dan terealisasi sebesar 100%. Keduanya memiliki capaian melebihi target karena partisipasi aktif lembaga ekonomi, sosial, dan budaya, yang mendorong meningkatnya keaktifan lembaga sasaran dalam setiap kegiatan pembinaan. Selain itu, sinergi dan koordinasi yang baik antara perangkat daerah, narasumber, serta para pemangku kepentingan terkait turut mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan.
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial diukur melalui indikator Persentase Konflik yang Dimediasi dengan target sebesar 75% dan terealisasi sebesar 100% didukung satu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan indikator Persentase Peningkatan Penanganan Konflik dengan target sebesar 3% dan terealisasi sebesar 3,85%. Keduanya memiliki capaian melebihi target karena didukung oleh terjalinnya sinergi dan koordinasi yang baik antara Bakesbangpol Kota Pasuruan dengan jajaran samping maupun OPD yang terkait.

Faktor Pendorong :

1. Dukungan kebijakan dari pimpinan daerah yang kuat terhadap

program pembinaan ideologi Pancasila, politik dalam negeri, dan ketahanan nasional.
2. Sinergi dan komunikasi yang baik antara Bakesbangpol dengan Forkopimda, TNI/Polri, dan perangkat daerah terkait.
3. Antusiasme masyarakat, pelajar, dan ormas dalam mengikuti kegiatan pembinaan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol.
4. Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, kebutuhan organisasi, dan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan, serta didukung oleh koordinasi dan pengelolaan administrasi yang baik.

Faktor Penghambat

1. Sebagian kegiatan belum dapat dilaksanakan sehubungan dengan penyesuaian terhadap kondisi dan situasi yang ada.
2. Belum optimalnya sistem pelaporan kegiatan dan dokumentasi berbasis data yang terintegrasi.
3. Masih terdapat organisasi kemasyarakatan atau komunitas yang belum terdaftar maupun belum melakukan pemutakhiran data kelembagaannya.

Dalam rangka mengoptimalkan faktor pendorong serta meminimalisir dampak faktor penghambat terhadap capaian kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan menetapkan beberapa arah kebijakan strategis sebagai berikut :

- Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- Peningkatan Ketahanan Sosial dan Politik Masyarakat
- Penguatan Peran FKUB, FKDM, Forum Kewaspadaan dan Mitra Strategis Lain
- Peningkatan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Konflik Sosial
- Peningkatan Partisipasi Politik dan Pendidikan Politik Masyarakat
- Penataan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik
- Penguatan Kerukunan dan Dialog Lintas Sektor
- Penguatan Kapasitas Kelembagaan Bakesbangpol

Penerapan kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan secara berkelanjutan, memperkuat tata kelola

penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

2.4 Telaah Pokok Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD adalah saran dan pendapat DPRD yang dihimpun berdasarkan hasil pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD, khususnya melalui kegiatan reses, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2027, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tidak memiliki program, kegiatan, maupun subkegiatan yang bersumber dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Oleh karena itu, penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 tidak mengakomodasi usulan yang berasal dari Pokir DPRD.

Tabel 2.4
Telaah Pokok - Pokok Pikiran DPRD

No	Pengusul	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
	N I H I L	-	-	-	-	-	-

2.5. Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Sampai dengan penyusunan Renja Tahun 2027, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan belum memiliki inovasi pada bidang urusan yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, upaya pengembangan inovasi terus dilakukan sebagai bagian dari peningkatan kualitas tata kelola perangkat daerah. Salah satu inovasi yang sedang dipersiapkan adalah pengembangan sistem perencanaan terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Inovasi tersebut direncanakan mulai dikembangkan pada akhir Tahun 2026 dan diimplementasikan secara bertahap pada Tahun 2027.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2027

Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2027 berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2027 disusun selaras dengan arah kebijakan serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga terwujud kesinambungan dan konsistensi pelaksanaan pembangunan.

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan adalah meningkatnya keharmonisan sosial, yang diukur melalui Indeks Keharmonisan Sosial. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan tiga sasaran, yaitu meningkatnya toleransi masyarakat dengan indikator Indeks Toleransi, meningkatnya keterlibatan komunitas dengan indikator Indeks Keterlibatan Komunitas, serta menurunnya konflik sosial di masyarakat dengan indikator Indeks Konflik Sosial.

Penetapan target indikator tujuan dan sasaran dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2027 berpedoman pada Renstra Tahun 2025–2029 dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan dalam Renstra masih relevan untuk dijadikan acuan pada Tahun 2027, sehingga tidak dilakukan penyesuaian target. Selanjutnya, target indikator tujuan dan sasaran Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2027	Target Renja 2027	Catatan Analisa
	TUJUAN						
1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Toleransi dan Rukun	Indeks Keharmonisan Sosial	Indeks	59,13	61	61	Target dipertahankan sesuai Renstra Tahun 2025–2029. Realisasi Tahun 2025 sebesar 59,13 menunjukkan capaian yang masih perlu ditingkatkan agar target Tahun 2027 sebesar 61 dapat tercapai.
	SASARAN						
1	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi	Indeks	86,81	91	91	Target dipertahankan sesuai Renstra Tahun 2025–2029. Realisasi Tahun 2025 sebesar 86,81 masih berada di bawah target Tahun 2027 sehingga diperlukan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan.
2	Meningkatnya Keterlibatan Komunitas	Indeks Keterlibatan Komunitas	Indeks	50	52	52	Target dipertahankan sesuai Renstra Tahun 2025–2029. Realisasi Tahun 2025 sebesar 50 menunjukkan perlunya peningkatan partisipasi komunitas melalui pembinaan dan pemberdayaan secara berkelanjutan.
3	Menurunnya konflik sosial di masyarakat	Indeks Konflik Sosial	Indeks	40,59	40	40	Target dipertahankan sesuai Renstra Tahun 2025–2029. Upaya pencegahan dan deteksi dini konflik sosial perlu terus ditingkatkan agar indikator dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan pelaporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan, sampai dengan penyusunan Renja Tahun 2027 belum ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi

kewenangan perangkat daerah. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tidak menetapkan target IKK Tahun 2027 dan tidak menyajikan tabel target IKK dalam dokumen Renja ini.

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Kunci

No	IKK	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2027	Target Renja 2027	Catatan Analisa
	N I H I L	-	-	-	-	-

3.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2025–2029 serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, arah kebijakan pembangunan daerah dalam RKPD Kota Pasuruan Tahun 2027, dan kebijakan pembangunan lainnya yang relevan. Penyelarasan tersebut bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perangkat daerah.

Tema RKP Tahun 2027 yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri", serta tema pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2027 yaitu "Meningkatkan Peran Industri dan Perdagangan dalam Menciptakan Daya Saing Daerah", menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Meskipun tidak secara langsung melaksanakan urusan ekonomi, industri, maupun perdagangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, harmonis, dan kondusif sebagai prasyarat terciptanya iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan daya saing daerah.

Sejalan dengan arah pembangunan tersebut, arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2027 difokuskan pada:

1. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
2. Peningkatan ketahanan sosial dan politik masyarakat.
3. Penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta forum dan mitra strategis lainnya.

4. Peningkatan sistem deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.
5. Peningkatan partisipasi politik dan pendidikan politik masyarakat.
6. Penataan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan serta partai politik.
7. Penguatan kerukunan dan dialog lintas sektor.
8. Penguatan kapasitas kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Melalui arah kebijakan tersebut, diharapkan penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dapat mendukung terciptanya stabilitas politik, keamanan, dan kehidupan masyarakat yang harmonis, sehingga memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2027.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2027 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Penyusunannya mengacu pada RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025–2029, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025–2029, serta selaras dengan visi dan misi Wali Kota Pasuruan.

Rencana kerja Tahun 2027 difokuskan pada penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, peningkatan ketahanan sosial dan politik masyarakat, penguatan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial, peningkatan partisipasi politik masyarakat, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta penguatan kapasitas kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Melalui perencanaan dan pendanaan yang terarah, diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, serta mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2027 terdiri atas 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 5 program teknis, 13 Kegiatan dan 35 sub Kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Program-program tersebut menjadi instrumen dalam mendukung pencapaian tujuan, sasaran, serta arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan.

2. Dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2027 terdapat 2 (dua) subkegiatan baru yang tidak termuat dalam Renstra Tahun 2025–2029. Penambahan subkegiatan ini merupakan tindak lanjut atas arah kebijakan dan prioritas nasional yang mendukung pencapaian program Asta Cita. Kedua subkegiatan dimaksud adalah: 1)Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
3. Program dan kegiatan Tahun 2027 diarahkan pada penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, peningkatan ketahanan sosial dan politik masyarakat, peningkatan partisipasi politik dan pendidikan politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan partai politik, penguatan peran FKUB, FKDM, serta forum strategis lainnya, dan peningkatan deteksi dini serta pencegahan konflik sosial.
4. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2027 sebesar Rp 6.760.436.355 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2027 tersaji pada tabel berikut :

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**6.760.436.355,00**								**7.337.963.765,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**6.760.436.355,00**								**7.337.963.765,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**6.760.436.355,00**								**7.337.963.765,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.919.422.177,00**								**4.115.521.786,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						***3.919.422.177,00***								***4.115.521.786,00***	

			1.Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3 Level		3 Level	3 Level	3.919.422.177,00							3 Level	4.115.521.786,00	
			2.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.5 Angka		78.8 Angka	80 Angka	3.919.422.177,00							81.2 Angka	4.115.521.786,00	
	8.01.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.993.300,00						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan		8.392.965,00	
			Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen		13 Dokumen	12 Dokumen	743.120,00							1 Laporan	780.276,00	
	8.01.1.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.439.500,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			6.761.475,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		7 Dokumen	6 Dokumen	6.439.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggun	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Dokumen	6.761.475,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

									grejo || Kelurahan Pekuncen || 0								
	8.01.01.2.01.00006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						810.680,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			851.214,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	810.680,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Laporan	851.214,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.1.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						743.120,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			780.276,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	743.120,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	780.276,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.480.924.410,00						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan		3.654.038.232,00	
		Tersusunnya dan terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.480.924.410,00						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan		3.654.038.232,00	
			Persentase laporan keuangan	100 %		100 %	100 %	3.461.499.470,00							22 Orang/bulan	3.634.574.443,00	

			yang tersusun tepat waktu														
	8.01.1.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.461.499.470,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			3.634.574.443,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan		33 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.461.499.470,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					22 Orang/bulan	3.634.574.443,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.1.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						19.424.940,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkung		1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			19.463.789,00	

											an, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						
		Terkoordinasinya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	19.424.940,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0						17 Laporan	19.463.789,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						8.860.800,00						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan		9.305.625,00	
		Tersusunnya dan terlaksananya administrasi barang berkala setiap tribulanan						8.860.800,00						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan		9.305.625,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah			4 Laporan	4 Laporan	8.860.800,00							4 Laporan	9.305.625,00	

	8.01.1.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						8.860.800,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			9.305.625,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.860.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	9.305.625,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						979.000,00						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan		1.027.950,00	
		Tersusunnya dokumen kepegawaian berupa SKP, Anjab/ABK, PK dan PK Perubahan						979.000,00						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan		1.027.950,00	

			Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	4 Dokumen		6 Dokumen	4 Dokumen	979.000,00							4 Dokumen	1.027.950,00	
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						979.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			1.027.950,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	979.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Dokumen	1.027.950,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						35.335.220,00						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan		37.101.981,00	
		Tersusunnya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa						35.335.220,00						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan		37.101.981,00	

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	994.200,00							1 Dokumen	1.043.910,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.546.300,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			2.673.615,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	2.546.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Paket	2.673.615,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					4.275.320,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			4.489.086,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	2 Paket	4.275.320,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	4.489.086,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						994.200,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			1.043.910,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	994.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	1.043.910,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					1.800.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			1.890.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	1.890.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.1.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.753.900,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			4.991.595,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.753.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	4.991.595,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20.965.500,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			22.013.775,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	20.965.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	22.013.775,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.200.000,00						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan		7.560.000,00	
		Tersedianya barang milik daerah						7.200.000,00						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan		7.560.000,00	
			Jumlah barang milik daerah yang disediakan	5 unit		0 Unit	1 Unit	7.200.000,00							5 Unit	7.560.000,00	

	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.200.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			7.560.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	1 Unit	7.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	7.560.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						276.495.447,00						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		290.329.333,00	
		Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan						276.495.447,00						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		290.329.333,00	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	90.658.000,00							12 Laporan	95.190.900,00	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						90.658.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			95.190.900,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	90.658.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	95.190.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.1.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						185.837.447,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			195.138.433,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	185.837.447,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	195.138.433,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						101.634.000,00						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		107.765.700,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						101.634.000,00						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		107.765.700,00	
			Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	24 Unit		25 Unit	21 Unit	24.000.000,00							1 Unit	26.250.000,00	

	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						27.422.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			28.793.100,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	27.422.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	28.793.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						43.456.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			45.628.800,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	43.456.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Unit	45.628.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					6.756.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			7.093.800,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		16 Unit	12 Unit	6.756.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					15 Unit	7.093.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.09.00.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						24.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			26.250.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	26.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**549.075.400,00**								**576.529.170,00**	
		Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						***549.075.400,00***								***576.529.170,00***	

			1.Persentase masyarakat yang mengikuti pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	95 %		90 %	90 %	549.075.400,00							95 %	576.529.170,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						549.075.400,00						Masyarakat Kota Pasuruan		576.529.170,00	
		Meningkatnya Pemahaman Pemuda Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						549.075.400,00						Masyarakat Kota Pasuruan		576.529.170,00	
			Persentase Peningkatan Pemahaman Pemuda Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90%		80%	80 %	6.855.600,00							100 Orang	7.198.380,00	
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						6.855.600,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			7.198.380,00	

											makmur.						
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang		50 Orang	50 Orang	6.855.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					100 Orang	7.198.380,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka						542.219.800,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			569.330.790,00	

										adil dan makmur .						
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	74 Orang		74 Orang	74 Orang	542.219.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					74 Orang	569.330.790,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**1.243.046.300,00**								**1.305.198.615,00**	
		TERWUJUDNYA PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						***1.243.046.300,00***								***1.305.198.615,00***	
			1.Persentase lembaga pendidikan yang mendapatkan	100 %		73.3 %	80 %	1.243.046.300,00							86.6 %	1.305.198.615,00	

			pendidikan politik pemilih pemula													
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						1.243.046.300,00						Kelompok pemilih pemula, Partai politik dan masyarakat		1.305.198.615,00	
		Terimplementasinya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						1.243.046.300,00						Kelompok pemilih pemula, Partai politik dan masyarakat		1.305.198.615,00	
			Persentase kebijakan di bidang politik yang terimplementasikan	100%		100 %	100 %	0,00							1 Dokumen	0,00	

	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						0,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			0,00	
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						1.221.570.100,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			1.282.648.605,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	135 Orang		85 Orang	60 Orang	1.221.570.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					135 Orang	1.282.648.605,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						21.476.200,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			22.550.010,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	36 Orang	21.476.200,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	22.550.010,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI**						**35.302.998,00**								**37.068.147,00**	

		KEMASYARAKATAN														
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan					***35.302.998,00***								***37.068.147,00***	
			1.Persentase Organisasi Masyarakat yang teregister	93 %		89 %	90 %	35.302.998,00							91 %	37.068.147,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					35.302.998,00						Masyarakat Kota Pasuruan		37.068.147,00	
		Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang dibina					35.302.998,00						Masyarakat Kota Pasuruan		37.068.147,00	
			Persentase Organisasi Masyarakat yang mengikuti pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	20%		20%	20 %	1.035.600,00							1 Laporan	1.087.380,00	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					24.407.498,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			25.627.872,00	

											untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 Orang		175 Orang	140 Orang	24.407.498,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					20 Orang	25.627.872,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						9.859.900,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			10.352.895,00	

											adil dan makmur.						
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	159 Orang		86 Orang	20 Orang	9.859.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					157 Orang	10.352.895,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						1.035.600,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			1.087.380,00	

											adil dan makmur .						
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.035.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	1.087.380,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**169.302.600,00**								**240.780.166,00**	
		MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						***169.302.600,00***								***240.780.166,00***	
			1.Persentase lembaga ekososbud yang dibina	56.7 %		36.08 %	41.23 %	169.302.600,00							46.39 %	240.780.166,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						169.302.600,00						Masyarakat Kota Pasuruan		240.780.166,00	
		Terlaksananya pembinaan Ketahanan						169.302.600,00						Masyarakat Kota Pasuruan		240.780.166,00	

		Ekonomi, Sosial dan Budaya														
			Persentase lembaga ekosobud yang menikuti sosialisasi bahaya narkoba	56,7%		51,54 %	51,54 %	1.025.100,00							1 Laporan	25.488.855,00	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						4.924.300,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			5.170.515,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	55 Orang		38 Orang	30 Orang	4.924.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					45 Orang	5.170.515,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Kepercayaan di Daerah	Penghayat Kepercayaan di Daerah													
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					163.353.200,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			210.120.796,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250 Orang		250 Orang	288 Orang	163.353.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					250 Orang	210.120.796,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						1.025.100,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			25.488.855,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.025.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	25.488.855,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**844.286.880,00**								**1.062.865.881,00**	

		TERWUJUDNYA PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					***844.286.880,00***								***1.062.865.881,00***	
			1.Persentase potensi konflik yang terselesaikan	100 %		100 %	100 %	844.286.880,00							100 %	1.062.865.881,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						844.286.880,00						Masyarakat Kota Pasuruan		1.062.865.881,00	
		Terselesaikannya potensi konflik yang ada serta terlaksananya penanganan konflik sosial						844.286.880,00						Masyarakat Kota Pasuruan		1.062.865.881,00	
			Persentase masyarakat yang mengikuti keg. Pembinaan Kewaspadaan Dini	95%		90%	90%	125.125.380,00							1 Dokumen	139.319.649,00	
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						73.651.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			90.201.762,00	

											masyarakat yang adil dan makmur.						
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	73.651.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	90.201.762,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						5.315.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beraga	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			7.064.820,00	

											ma untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang		40 Orang	50 Orang	5.315.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					50 Orang	7.064.820,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						484.229.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beraga	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			662.514.825,00	

											ma untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	484.229.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Laporan	662.514.825,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.00.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						125.125.380,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			139.319.649,00	

											beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.125.380,00	Provinsi Jawa Timur || Kota Pasuruan || Kecamatan Panggungrejo || Kelurahan Pekuncen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	139.319.649,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						155.966.500,00			-	-	1. Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan sosial dan ekonomi			163.764.825,00	

		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	3000 Orang	155.966.500,00	Kota Pasuruan	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	163.764.825,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H						**6.760.436.355,00**								**7.337.963.765,00**	

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama

Kinerja penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan gambaran tingkat keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, tertib, demokratis, serta berwawasan kebangsaan. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025–2029 serta mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025. Indikator tersebut digunakan sebagai dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja guna memastikan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pada Tahun 2027, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

- Indeks Keharmonisan Sosial;
- Indeks Toleransi;
- Indeks Keterlibatan Komunitas; dan
- Indeks Konflik Sosial.

Pencapaian keempat indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memperkuat ketahanan ideologi, meningkatkan toleransi dan partisipasi masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial dan politik di Kota Pasuruan. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2027	Target Renja 2027
1	Indeks Keharmonisan Sosial	Indeks	59,13	61	61
2	Indeks Toleransi	Indeks	86,81	91	91

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2027	Target Renja 2027
3	Indeks Keterlibatan Komunitas	Indeks	50	52	52
4	Indeks Konflik Sosial	Indeks	40,59	40	40

5.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan pelaporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan, sampai dengan penyusunan Renja Tahun 2027 belum ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tidak menetapkan target IKK Tahun 2027 dan tidak menyajikan tabel target IKK dalam dokumen Renja ini.

Tabel 5.2 Indikator Kinerja Kunci

No	IKK	Satuan	Realisasi 2025	Target Renstra 2027	Target Renja 2027
	N I H I L	-	-	-	-

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2027 merupakan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan selama satu tahun anggaran sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penyusunan Renja ini mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025–2029 serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Pelaksanaan Renja Tahun 2027 diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik melalui penguatan ideologi Pancasila, peningkatan ketahanan sosial dan politik masyarakat, penguatan kerukunan, peningkatan partisipasi politik, serta pencegahan potensi konflik sosial. Keberhasilan pelaksanaannya memerlukan komitmen, koordinasi, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dengan tersusunnya Renja Tahun 2027 ini, diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan kondusif, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Pasuruan.

Pasuruan, 07 Agustus 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PEMERINTAH KOTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

HERY DWI SUJATMIKO, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199003 1 001

RENCANA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Visi : PASURUAN KOTA ANUGRAH " Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya, Harmonis Soisal Budayanya, Indah Kotanya
Misi : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berorientasi Pada Peran Kepemudaan, Kebudayaan dan Harmonisasi Sosial

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPRASIONAL	2025		2026	2027	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	TARGET	TARGET	
	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Toleransi dan Rukun	Indeks Keharmonisan Sosial	Mengukur tingkat keharmonisan antar kelompok masyarakat berdasarkan beberapa indikator yaitu Indeks Toleransi, Indeks Keterlibatan Komunitas dan Indeks Konflik Sosial	59,83	59,13	60,00	61,00	Target Indeks Keharmonisan Sosial ditentukan berdasarkan perhitungan rata-rata Indeks Toleransi, Indeks Keterlibatan Komunitas, dan Indeks Konflik Sosial. Dengan demikian, besaran target indikator ini bergantung pada target yang ditetapkan pada masing-masing ketiga indeks pembentuknya.
	Meningkatnya Toleransi Masyarakat	Indeks Toleransi	Menilai seberapa besar toleransi masyarakat terhadap perbedaan agama, etnis, dan budaya	89,5	86,81	90	91	Target Indeks Toleransi ditetapkan berdasarkan analisis capaian tiga tahun terakhir, sehingga target pada tahun-tahun berikutnya disusun dengan peningkatan secara bertahap.
	Meningkatnya Keterlibatan Komunitas	Indeks Keterlibatan Komunitas	Mengukur seberapa banyak lembaga (Ormas, Lembaga Ekososbud, Lembaga Pendidikan dan Parpol) yang terlibat dalam kegiatan pembinaan di Bakesbangpol	45	50	47	52	Target Indeks Keterlibatan Komunitas ditetapkan berdasarkan nilai baseline Tahun 2024 yang diperoleh melalui perhitungan sesuai formulasi indikator yang berlaku. Nilai baseline tersebut menjadi acuan dalam penyusunan target kinerja tahun berikutnya, dengan proyeksi peningkatan secara bertahap per tahun sebagai bentuk upaya peningkatan partisipasi dan keterlibatan komunitas dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

	Menurunnya konflik sosial di masyarakat	Indeks Konflik Sosial	Mengukur Jumlah insiden konflik yang terjadi di Kota Pasuruan, terdiri dari beberapa jenis konflik yaitu: 1. Cek-cok/tawuran antar warga 2. Pencurian/pelanggaran hukum ringan 3. Tawuran/keributan/pengeroyokan 4. Pelanggaran norma/tatib umum 5. SARA/konflik antar kelompok besar catatan : Penurunan nilai indeks mencerminkan tren negatif konflik sosial, yang menunjukkan semakin menurunnya intensitas konflik dan semakin kondusifnya kondisi wilayah.	45	40,59	43	40	Target Indeks Konflik Sosial ditetapkan berdasarkan baseline jumlah konflik Tahun 2024 yang dihitung sesuai formulasi indikator. Karena indikator ini memiliki tren negatif, maka target disusun menurun secara bertahap, di mana semakin rendah nilai indeks menunjukkan kondisi sosial yang semakin aman dan kondusif.

Pasuruan, 19 Juni 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

HERY DWI SUJATMIKO, S.Sos, MM.

NIP 197012231990031001